BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem internasional menurut perpektif neo-realis yang tidak adanya tata aturan (*anarchy*) menjadikan hubungan antar negara menjadi sangat kompetitif. Dimana setiap negara berupaya untuk menyebarkan pengaruhnya baik dalam lingkup regional maupun dunia. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara maju dan mempunyai "*power*" di dunia.

Dalam konteks hubungan internasional, *power* dapat diartikan sebagai kapasitas sebuah negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun baik itu dari pihak negara lain ataupun organisasi internasional. Dalam hubungan internasional, *power* menurut pola dan karakter diantaranya ialah negara dengan *Super Power*, *Great Power*, *Middle Power*, dan *Small Power*.

Negara *super power* dianggap negara yang memiliki pengaruh dan juga *power* terkuat di dunia. Negara tidak hanya maju dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang militer dan lainnya. Negara yang memiliki *super power* dianggap sebagai negara yang mampu mempengaruhi tatanan dunia internasional secara keseluruhan. Negara dengan *super power* contohnya adalah negara Amerika Serikat.

Negara *great power* adalah negara yang mempunyai karakteristik yaitu kekuatan militer dan ekonomi yang maju, mempunyai pengaruh diplomatik dan budaya yang dapat mempengaruhi *small power* untuk mempertimbangkan pendapat *great power* sebelum mengambil tindakan. Banyak pengamat hubungan internasional yang berpendapat bahwa negara China masuk dalam salah satu Negara *great power*.

Hal tersebut dikarenakan China mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki ketahanan nasional yang kuat dilengkapi dengan persenjataan yang terus diperbaharui dan canggih. Namun hal tersebut tidak dapat melebihi

UPN "VETERAN" JAKARTA

kemampuan negara-negara *super power* yang dapat memberikan pengaruh lebih banyak bagi tatanan internasional

Perkembangan pesat yang dilakukan oleh China telah menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir. Implikasi kebangkitan China terihat dari berbagai bidang diantaranya dari perluasan pengaruhnya dan militer. Hal ini juga telah menjadi perdebatan diantara komunitas internasional dan dalam tubuh China sendiri dimana pentingnya memahami prestasi China dan jalan yang ditempuh untuk pembangunan yang lebih besar (Bijian 2005,p.1).

Tujuan utama bagi setiap negara terutama *great power* adalah untuk mempertahankan eksistensi dirinya (*survival*). China merupakan salah satu negara *great power* yang memiliki potensi untuk menjadi hegemon di kawasan Asia dan juga dunia. Sebagai negara *great power,* yang dilakukan China adalah untuk bisa bertahan dalam sistem internasional yang anarki dan membantu dirinya sendiri agar tidak menjadi korban dari agresi negara lain.

China adalah salah satu negara sosialis-komunis yang terbilang cukup eksis hingga saat ini. Terbukti dengan munculnya China sebagai pusat kekuatan ekonomi tidak hanya di kawasan tetapi juga dunia. Pada bidang pertahanan dan keamanan, banyak isu-isu muncul terkait dengan semakin kuatnya militer China ditambah dengan produksi peralatan militer seperti; jet tempur, kapal selam, kapal induk, tank dan lain-lain. China juga merupakan negara yang berada diposisi pertama dengan jumlah tentara yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

China merupakan negara yang tergolong aktif dalam organisasi internasional dan hubungan diplomatik lainnya. China termasuk kedalam negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti *United Nations* (PBB), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (*dialogue partner*), *Food and Agriculture Organization (FAO), World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), Interpol dan sebagainya. Hubungan diplomatik antara China dengan beberapa negara dunia tergolong harmonis.

Peran China baik dikawasan maupun diluar kawasan menjadi sangat aktif. Selain kawasan Asia Timur dan Tengah, China juga mulai “aktif” di daerah Timur

Tengah. peran China juga menonjol ketika memecah konflik Suriah. Konflik Suriah disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah, hal tersebut diawali dengan dimulainya demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad dan mengakhiri lima dekade pemerintahan partai Ba'ath. Para pemberontak yang bersatu dibawah bendera Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*/FSA) berjuang dengan cara yang semakin terorganisir. Dapat diatakan bahwa pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah.

Kondisi di suriah memanas dengan dimulainya demonstrasi publik yang dimulai di kota Deraa pada bulan Maret 2011 menyerukan tuntutan pembebasann lima belas anak sekolah yang semuanya adalah laki-laki berusia 10-15 tahun membuat coretan di dinding sekolah yaitu slogan revolusi yang diteriakan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya yaitu "*As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam!"* yang artinya "rakyat/ingin/menumbangkan rezim!". Slogan Revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah (Kuncahyo 2012,hlm.77). Anak-anak tersebut ditangkap dan dilaporkan disiksa oleh pasukan keamanan Suriah.

Sejak anak-anak tersebut dipenjara, demonstrasi terus terjadi di Deraa. Mereka menuntut agar korupsi diakhiri dan pembebasan anak-anak itu serta kebebasan politik yang lebih besar. jawaban aparat keamaan terhadap para demonstran adalah tembakan, para demonstran ditembaki dan tiga orang tewas. Tewasnya para demonstran semakin membakar kemarahan rakyat. Selanjutnya, demonstrasi secara besaar-besaran bergerak menuju kantor Partai Ba'ath yang berkuasa di Suriah. Para demonstran menuntut pencabutan undang-undang darurat yaitu undang-undang yang memberikan kebebasann kepada aparat keamanan untuk menangkap, menahan, dan mengintrogasi tanpa adanya surat penangkapan.

Situasi politik di Suriah semakin tidak terkontrol, konflik pun meluas antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan rakyat yang menuntut kebebasan dan penggulingan rezim. Sulit menghindari dari kesan bahwa perang saudara di Suriah mengarah pada konflik sektarian. Gerakan perlawanan yang meletus di Suriah sejak Maret 2011 dijawab oleh pemerintah dengan keuatan

militer, korban jiwa, korban luka, begitu juga dengan pengungsi. Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan.

Konflik Suriah mulai mendapat sorotan dari dunia intenasional ketika pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama "*Day of Dignity*" di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Selanjutnya di kota Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania, pasukan keamanan menembak dan membunuh sejumlah demonstran yang diberi nama "*Day of Dignity*". Pada tanggal 27 Maret 2011 pasukan Suriah menembaki ratusan demonstran yang menyerukan pencabutan undang-undang darurat dan 16 orang tewas pada hari itu (Kuncahyo 2012,hlm.247) .

Selain itu, tragedy Houla yang terjadi pada 25 Mei 2012 juga mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Houla terdiri dari tiga desa, Taldou, Kafr Laha, Tell Dahab yang masing-masingnya berpenduduk sekitar 25.000 hingga 30.000 orang. Usai shalat Jumat, sekelompok warga melakukan aksi demonstrasi. Mereka memprotes rezim dan menyuarakan agar Assad segera turun. Namun hal ini disambut olleh tentara yang memborbardir selama dua jam. Tragedy di Houla tidak berhenti hanya disitu saja, pada malam hari tragedy brutal terjadi dimana pria-pria bersenjata mendatangi rumah demi rumah dan membantai para penghuninya (Sulaiman 2013,hlm.33). Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang 'sejiwa' dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah (Kuncahyo 2012,hlm.247).

Oleh karena hal tersebut, para anggota Dewan Keamanan PBB termasuk China membuat resolusi untuk memecah konflik yang terjadi di suriah. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota yaitu terdiri dari lima anggota tetap (*Permanent members*) China, Perancis, Federasi Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat dan 10 anggota tidak tetap (*non-permanent members*) yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun (Current Members, United Nations Security Council). Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan

Keamanan yang substantif. China termasuk diantara kelima negara yang mempunyai hak veto.

Dapat dikatakan bahwa China adalah pemain baru pada perpolitikan di Timur Tengah. Hampir dua pertiga cadangan minyak dunia yang sudah terbukti terkonsentrasi di teluk Arab. Negara-negara Teluk menguasai hampir 40 persen ekspor minyak mentah dunia, di mana porsi Arab Saudi sekirtar 12 persen dan Iran 7 persen. China menjadi net impor minyak pada tahun 1993 dan minyak mentah pada tahun 1996. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020 China harus mengimpor sekitar 57-73 persen dari kebutuhan minyaknya. China pertama kali khawatir terhadap pasokan minyaknya pada 1990-an dan mulai mengambil langkkah-langkah untuk mengamankan pasokannya. Dalam mengambil langkahnya di Timur Tengah, China melangkah dengan hati-hati di kawasan agar tidak membuat perkara dengan ASyang hubungannya dengan China adalah menjadi prioritas China diatas sejak reformasi dimulai. Bertolak belakang dengan Afrika, yang jelas sudah memperoleh arti penting utama dalam politik negerinya, China menganggap Timur Tengah berada pada lapis kedua (Jacques 2011,hlm.370-371) .

Selama tiga dekade terakhir ini, China sedang mengalami proses transformasi sosial dan ekonomi yang sangat luar biasa dan hal itulah yang menyebabkan kepentingan ekonomi China sering berbenturan dengan kepentingan politik negara-negara Barat di level internasional. China memandang penting negara itu selain karena Suriah sebagai salah satu importir utama minyak China (selain Iran), Suriah juga dipandang sebagai pintu masuk pasar ekspor komoditas Cina ke negara-negara di kawasan TimTeng. Cina juga ingin menjaga hubungan baiknya dengan Iran sebagai negara utama pemasok kebutuhan minyak China yang sikap politik internasional-nya sangat mendukung rezim Presiden Bashar Al-Assad di Suriah.

Iran dan Suriah adalah dua negara pemasok utama kebutuhan minyak Cina. Sikap China yang bersikeras ingin mempertahankan rezim Bashar al-Assad di Suriah merupakan poin penting yang menggambarkan bahwa China berpendapat kebutuhan minyak nasionalnya bergantung pada runtuh tidaknya rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. China tampaknya telah siap menempuh rintangan

apapun demi mempertahankan rezim al-Assad di Suriah, meskipun harus bertentangan dengan pendapat negara lain di Dewan Keamanan PBB. Setelah kebijakan luar negerinya yang menyatakan bahwa China mendukung adanya intervensi secara diplomatik dan bukan militer.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, "Bagaimana peran China dalam membatalkan draft resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah?"

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan peran PBB dan Dewan Keamanan dalam konflik Suriah. peran PBB dan Dewan Keamanan tersebut adalah dengan membuat resolusi-resolusi dan draft resolusi untuk mengakhiri konflik di Suriah
b. Untuk menjelaskan bagaimana peran China dalam membatalkan draft resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik di Suriah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi di dalam jurusan hubungan internasional untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan peran China di Timur Tengah dan Organisasi Internasional.
b. Secara praktis**,** diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi didalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai peran organisasi internasional yaitu PBB dan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik Suriah melalui resolusi-resolusi dan sejumlah draft resolusi. Serta mengetahui bagaimana peran aktif China di Timur Tengah khususnya Suriah yang menyita perhatian masyarakat

internasional lewat beberapa upaya China untuk membatalkan draft resolusi Dewan Keamanan.

I.5 Tinjauan Pustaka

Didalam skripsi ini penulis akan membedah tiga temuan terkait tema ini yang membahas mengenai dinamika negara China dalam membatalkan resolusi DK PBB terhadap Suriah yaitu pada Skripsi yang berjudul *Kepentingan Cina dalam Konflik Suriah* (Mutholib 2013, hlm.1) yang membahas mengenai keterlibatan Cina dalam konflik Suriah dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya.

Skripsi ini menelaah mengenai keterlibatan Cina pada dasarnya merupakan sebuah titik balik diplomasi Cina terhadap isu-isu di Timur Tengah diantaranya dengan keputusan Cina menggunakan hak veto pada krisis Suriah. Aktivitas diplomasi Beijing dalam konflik Suriah menunjukkan upaya untuk memperluas pengaruh Cina dalam menyelesaikan krisis internasional untuk meningkatkan profil diplomatik Cina di mata internasional, selain itu peran strategis Suriah di tengah-tengah geo-politik internasional sangat penting bagi beberapa negara besar dunia seperti Cina.

Dalam skripsi ini Abdul memetakan konflik Suriah yang telah menelan banyak korban jiwa memicu dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012 yang merupakan salah satu bentuk dukungan dari upaya penyelesaian konflik yang dicanangkan oleh Liga Arab mengenai penggabungan pasukan pemelihara perdamaian Arab-PBB. Resolusi yang mengarah kepada upaya perdamaian ini berisikan tentang tuntutan pemerintahan Suriah agar segera memberhentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa setiap harinya akibat kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil Suriah.

Selain itu, Abdul juga melihat bahwa dalam resolusi ini juga diupayakan agar pemerintah Suriah mau membuka dialog politik yang memungkinkan tentang hak-hak warganya untuk mengekspresikan pendapat dibalik kebijakan otoriter yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan Suriah. Meski demikian, resolusi ini menimbulkan pro-kontra di dalam Dewan Keamanan sendiri. Cina dan Rusia

memilih untuk mendukung pemerintahan Suriah. Intinya mereka berkaca pada pengalaman, tidak setuju pada intervensi barat seperti pada kasus-kasus lainnya.

Selanjutnya, Abdul melihat bahwa mencapai perdamaian dan melindungi hak asasi manusia merupakan rumusan dari resolusi yang digagas oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, dalam proses menuju pemberlakuan resolusi ini ditemukan banyak hambatan, sehingga resolusi ini tidak dapat diimplementasikan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Suriah. Hal ini dikarenakan oleh syarat diberlakukannya sebuah resolusi dari Dewan Keamanan PBB adalah dengan memperoleh kesepakatan sekurang-kurangnya sembilan anggota tidak tetap dan harus disepakati oleh seluruh anggota tetap (Cina, Inggris, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat). Hal ini tertera dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 3. Kemudian dalam konflik Suriah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ditemukan kasus dimana Cina beserta Rusia mengeluarkan hak vetonya, sehingga berdampak pada penyelesaian konflik Suriah yang terhambat karena dibatalkannya resolusi tersebut.

Selanjutnya dalam Jurnal karya Yoram Evron yang berjudul *Chinese Involvement in the Middle East: The Libyan and Syrian Crises* (Evron 2013, p.1) yang menjelaskan mengenai keterlibatan China dalam dua krisis di Timur Tengah yaitu krisis Libia dan Suriah. Dalam jurnal ini juga menjelaskan apa saja alasan bagi China dalam keterlibatannya di China. Alasan China tentu saja demi kepentingan bagi negerinya sendiri, yaitu pasokan minyak ke negaranya. Keterlibannya ini membuktikan bahwa China sudah berkontribusi secara aktif di wilayah Timur Tengah dan tentu saja hal itu akan menimbulkan resiko bagi China.

Tanggapan China untuk krisis di Libya dan Suriah member cahaya baru pada beberapa asumsi umum tentang alasan China dan perilakunya di Timur Tengah. Asumsi yang diterima tentang keterlibatan China di Timur Tengah adalah ekonomi dan pertimbangannya untuk mendominasi pada bidang ekonominya. Namun asumsi ini dipatahkan dari analisis intervensi China pada kedua krisis di Timur Tengah ini. China dinilai lebih terlibat di dalam krisis Suriah daripada di krisis Libia.

Asumsi lain ialah China tidak ikut campur tangan lebih jauh dalam peristiwa politik di Timur Tengah, namun asumsi ini tidak didukung dari analisis dua krisis tersebut, karena dalam dua krisis ini China hanya mengambil tindakan dalam batas tertentu. Dalam tindakannya di kedua krisis tersebut, China menggunakan usahanya di dalam Dewan Keamanan dan juga berhubungan dengan pasukan pemberontak di kedua negara tersebut.

Pertimbangan yang terpenting bagi China adalah pandangan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan kekuatan global yang terlibat di dalam kawasan tersebut. Karena kekhawatiran akan bahaya kepada warga negaaranya, China belum pernah mengambil langkah-langkah operasional yang belum terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.

Selanjutnya, *Beyond the Veto: Chinese Diplomacy in the United Nations Security Council* oleh Joel Wuthnow (Wuthnow 2013, p.1) yang menjelaskan tentang munculnya China sebagai Cina muncul di awal abad 21 sebagai peserta aktif di Dewan Keamanan PBB. Bagi AS, China termasuk kedalam anggota yang rumit pada berbagai isu, termasuk pengambilan keputusan di Korea Utara, Iran, Irak, Sudan, Burma, Zimbabwe dan Libya. Kepentingan China di beberapa negara telah menimbulkan masalah bagi upaya untuk menargetkan rezim tersebut melalui Dewan dan kekuasaan di bawah Bab VII dari Piagam PBB.

Namun posisi China pada kasus-kasus ini kadang-kadang sejalan dengan AS (seperti yang terjadi pada Libya) dan pada lain isu China juga berdiri disisi oposisi (seperti pada Burma). Selanjutnya, dalam jurnal ini disebutkan bahwa adanya resiko strategis yang akan membahayakan kerjasama, karena resolusi Dewan Keamanan PBB akan membahayakan kepentingan China. lalu, adanya konsekuensi politik, yaitu “biaya” yang harus dibayar untuk hubungan China dengan AS dimana keduanya adalah sebagai *regional stakeholders* dan juga dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan posisi yang penting. Dalam jurnal ini juga memberikan narasi sejarah perubahan peran Cina di DK PBB dari tahun 1971 sampai dengan 2011, analisis meliputi delapan kasus, mencakup diplomasi China pada Korea Utara, Iran, Sudan, Burma dan Zimbabwe.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini menggunakan dua teori dan empat konsep yaitu teori Organisasi Internasional dengan konnsep PBB, Dewan Keamanan dan Hak Veto. Selanjutnya adalah Kebijakan Luar Negeri.

I.6.1 Teori Organisasi Internasional

Istilah organisasi internasional mempunyai dua arti yang berhubungan namun berbeda. Pertama, istilah it dapat dianggap sinonim dari lembaga interasional atau sebuah lembaga internasional (atau kelompok lembaga) dalam konteks lain organisasi internasional yang mengacu pada proses politik yang utama. Dalam proses ini Negara-negara anggota berusaha, melalui tindakan-tindakan kolektif dan percobaan diplomatic, mempermudah transaksi diantara mereka. Apalagi bila pokok persoalannya dianggap lebih efisien bila ditangani secara kolektif daripada secara kompetitif (Jones 1993, hlm.367). Organisasi dalam arti luas ialah organisasi yang melintasi batas negara (internasional) baik bersifat publik maupun privat, sedangkan organisasi dalam arti sempit adalah organisasi internasional yang hanya bersifat publik.

Organisasi internasional pun cukup memiliki peranan dalam dunia internasional. Sejak tahun 1648, dan terlebih lagi tahun 1815, para negarawan yang kreatif telah berusaha mengatasi berusaha mengatasi kelemahan institusional dengan mendirikan satu jaringan agen internasional guna pembuatan keputusan internasional. Agen-agen ini memang sulit diharapkan dapat menggantikan kedududkan negara-bangsa sebagai aktor utama. Namun terdapat cukup banyak bukti bahwa kehadirannya turut membantu penyelesaian perselisihan, pencegahan perselisihan, serta turut memudahkan pembuatan keputusan atas berbagai masalah (Jones 1993, hl.365).

Aktor internasional yang sebelumnya sangat didominasi oleh sistem negara mulai sedikit bergeser dengan menerima beberapa aktor lain dalam interaksi internasional seperti organisasi internasional, organisasi pemerintah dan atau non-pemerintah yang melintasi batas negara, perusahaan-perusahaan internasional, dan individu.

Namun jarang sekali lembaga internasional mampu memaksakan pemberlakuan keputusannya kepada para anggota. Organisasi-organisasi internasional hanya mengatur urusan antarnegara, bukan urusan suatu negara. Organisasi-organisasi supra nasional, sebaliknya, mempunyai wewenang diatas negara dan mampu memaksakannya dalam batas-batas yang telah ditentukan. Organisasi intenasional tidak menganggap dirinya dapat menggantikan kedudukan atau wewenang negara-bangsa atas berbagai kebijakan internal dan eksternal dari negara-bangsa tersebut (Jone 1993,hlm.365) .

Fungsi dan Peranan Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional adalah Setiap organisasi internasional tentu memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah menjadikan Organisasi Internasional sebagai salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri.

Namun, banyak negara menjadi anggota organisasi internasional antarpemerintah atau *Inter-Governmental Organization* (IGO), apa pun bentuknya, karena mereka berhaarap memperoleh manfaat. Tetapi efektivitas lembaga tersebut sebagai wadah kolektif tidak hanya ditentukan oleh pemerintah-pemerintah yang menjadi anggotanya (Jone 1993,hlm.347). Selain itu, organisasi internasional dapat menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

I.6.1.1 PBB

PBB adalah organisasi internasional yang lahir pada 24 Oktober 1945. PBB dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional terluas dan terlengkap, tetapi juga amat kompleks. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi besar atau organisasi internasional *par excellence* yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam

mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan internasional *(international peace and security)* ataupun di bidang ekonomi sosial.

Perserikatan Bangsa-Bangsa/*United Nations* (PBB/UN) didirikan dengan keyakinan bahwa bangsa-bangsa di duniadunia dapat dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara damai untuk perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Banyak yang telah berubah sejak PBB didirikan, keanggotaan telah bertambah hampir empat kali lipat, pertumbuhan penduduk dan globalisasi telah memberikan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi dalam PBB (*Basic Facts about the United Nations* 2011, p.5).

Tujuan utama pembentukan PBB ialah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB). Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu (Suryokusumo 1987,hlm.8):

a. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (pasal 2 ayat 3. Bab VI dan VII Piagam).
b. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam).
c. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39).
d. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
e. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

I.6.1.2 Dewan Keamanan PBB

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurusi masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dewan keamanan PBB lebih kompleks sekaligus lebih sederhana. Dikatakan lebih kompleks karena dewan ini tidak hanya menjadi ajang politik dunaia pada umumnya, tetapi juga politik negara-negara besar. Interaksinya lebih intensif dari majelis umum. Sehingga benturan pendapat didalamnya cenderung lebih mempengaruhi system internasional. Kompleksitasnya semakin terasa dengan mengingat jenis pokok permasalahan yang dihadapi dewan. Dewan ini juga dianggap lebih sederhana karena hak veto dari anggota tetap dapat menghentikan pembuatan keputusan (Jones 1993,hlm.377).

Dewan keamanan tumbuh atas persekutuan dasar para pemenang perang dunia kedua. Selama perang terdapat rasa antipasti dan saling mencurigai antara Barat dan Uni Soviet. Namun perlunya bersekutu melawan ancaman fasis menumbuhkan kerja sama di antara negara-negara besar yang kemudian menjadi pemenang perang. Manfaat kerja itu membuat mereka, termasuk Uni Soviet , merasa yakin bahwa kerjasama itu dapat diteruskan sebagai sarana kolektif melalui PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Jones 1993,hlm.377).

DK PBB Ini memiliki 15 anggota diantaranya lima anggota tetap (China, Perancis, Federasi Rusia, Inggris dan Amerika Serikat), dan 10 anggota dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Setiap anggota memiliki satu suara. Keputusan mengenai hal-hal prosedural yang dibuat oleh suara setuju minimal 9 dari 15 anggota. Keputusan mengenai hal-hal substantif membutuhkan sembilan suara dan tidak adanya suara negatif (veto) oleh salah satu dari lima anggota tetap. kelimaanggota tetap telah melaksanakan hak veto pada satu waktu atau yang lain (*Basic Facts about the United Nations* 2011,p.7).

Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian.

Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama *(Primary responsibility)* dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya, selanjutnya dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.

Selain itu DK juga merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum, merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa. Hal yang perlu diperhatikan adalah wewenang untuk meminta pihak-pihak yang terlibat agar menyelesaian sengketa dengan cara damai atau merekomendasi prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian, serta merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa pada hal-hal yang bersifat menganjurkan

(recommendatory) dan terbatas pada sengketa yang kemungkinan membahayakan perdamaian dan keamanan (Mauna 2000,hlm186).

Namun rasa saling curiga yang melekat dan pengalaman menakutkan Amerika terlibat dalam perang luar negeri yag tidak dikehendakinya, terlihat pada rumus pemungutan suara Dewa Keamanan yang rumit. Untuk hal-hal penting, keputusan Dewan diambil dari mayoritas sembilan suara "termasuk kesepakatan para anggota tetap". Aritinya keputusan itu bebas dari veti para anggota tetap.suara-suara abstain tidak dihitung sebagai suara negative.

Biasanya semua anggota tetap memilih suara abstain bila hal itu tidak mempengaruhi hasil keputusannya. Namun sebelumnya, perdebatan akan berlangsung mengenai arti dan dampak politik suara abstain tersebut. Dulu, hanya dengan ketidakhadiran Uni Soviet dalam bulan juni dan juli tahun 1950 maka kebijakan perang korea Washington disahkan oleh dewa keamanan. Sebenarnya, saat iitu banyak pengamat (termasuk dari soviet) berpendapat bahwa tanpa kehadiran salah satu dari lima anggota tetap, suara dewan tidak memiliki pengaruh mengikat terhadap organisasi. Dwasa ini, soal suara makin rumit karena munculnya berbagai macam makna sperti "setuju", "menentang", "abstain, "absen", atau "tidak ikut ambil bagian" (Mauna 2000,hlm.186).

I.6.2 Konsep Peran (Nasional)

Konsep peran dapat dikemukakan sebagai semua unit politikyang medeka dalam suatu sistem Internasional yang menampakkan satu dari tiga orientasi tradisional. Ketiga orientasi itu sendiri mencerminkan berbagai faktor seperti struktur sistem, persepsi ancaman, tingkat keterlibatan, sikap radikal-konservatif, dan lain-lain. Akan tetapi peran nasional adalah output kebijakan luar negeri yang hanya dikaitkan dengan negara yang terlibat dalam masalah sistem dan regional.

Dalam mempertimbangkan konsep peran nasional sebagai rumusan oleh pembuat kebijakan dapat dianalisa mengenai jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan umum yang sesuai dengan negara mereka dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh negara dalam berbagai lingkungan geografis dan masalah. Dalam salah satu studinya yang didasarkan pada analisis isi pidato oleh

para pembuat kebijakan tingkat tinggi di tujuh puluh satu negara selama kurun waktu 1965-1967, K.J Holsti mengemukakan bahwa ada paling sedikit enambelas tipe peran nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri suatu negara,yaitu (Holsti 1970,p.233-309):

a. *Bastion of Revolution, Liberator* (benteng revolusi,pembebas), dimana pemerintah merasa mereka mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai macam gerakan revolusi di luar negeri. Hal ini dilaksanakan untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagai pelindung gerakan revolusi asing dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral atau para pemimpin revolusi.
b. *Regional Leader* (pemipin daerah), dimana negara menyadari tugas dan tanggung jawab khusus dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama
c. *Regional Protector* (pelindung daerah), negara mengimplasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau issue-area, peran ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya.
d. *Active Independent* (bebas aktif), menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah konflik antar blok.
e. *Liberation Supporter* (pendukung pembebasan), peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan diluar negeri, tetapi mereka adalah simpatisan gerakan-gerakan ini.
f. *Anti-Imperealist agent* (agen anti imperalis), negara memandang dirinya sebagai ‘agen’ dalam perjuangan melawan imperealisme karena mereka melihat sebagai ancaman serius.
g. *Difender of the Faith* (perlindungan nilai-nilai), negara memandang kebijakan luar negerinya dalam nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.

h. *Mediator-Integrator* (penegah-pemersatu), beberapa negara memandang dirinya mampu atau bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain.
i. *Regional-Subsystem Collaborator* (penggabung sistem daerah), mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan unit politik lainnya.
j. *Developer* (pengembang), mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negara-negar berkembang. Untuk menjalankan peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu.
k. *Bridge* (jembatan), peran ini muncul dalam bentuk yang unik dan nampaknya tidak menstimulir tindakan tertentu. Peran ini biasanya tidak berlangsung lama.
l. *Faithful ally* (sekutu yang setia), dapat dikatakan bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu mereka dengan segala cara.
m. *Independent (* bebas), peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara didunia yang mengejar kepentingan mereka dalam keadaan apapun jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasionalnya.
n. *Example* (contoh), peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu.
o. *Internal Development* (pemeritah dalam negeri), Kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.
p. *Other Role* (peran lain), adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya.

I.6.3 Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal namun juga aspek-aspek internal suatu negara (Rosenau et.al 1976,p.5). Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran penting dalam hubungan internasional.

Kajian politik luar negeri dalam suatu sistem ialah rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses dan akhirnya menjadi suatu output. Proses yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal tentunya dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dan sarana lalu kapabilitas yang dimiliki negara tersebut (Rosenau 1980,p.171).

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau et.al 1976,p.15). Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Rosenau, jika mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa (Rosenau et.al 1976,p.15).

Adapun tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya ialah merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan

luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan (Rosenau 1969,p.167).

faktor-faktor/sumber sumber politik luar negeri melalui dua kontinum, dengan cara menempatkan sumber-sumber pada kontinum waktu (*time continum*) dan kontinum agregasi sistematik (*Systemic agregation continum*) (Rosenau,et.al 1976,p.18). Adapun Kontinum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus dan tetap *(sources that tend to change slowly*) dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*shortterm fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah (sources that tend to undergo rapid change).

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri ialah:

a. Sumber sistemik (*systemis sources*)

   Sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di anatara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional danm bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

b. Sumber masyarakat (*social sources*)

   Sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembnagunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam

masyarakat. Opini puiblik juga dapat menjadi faktor dimana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar

c. Sumber pemerintahan (*governmental sources*)

   Sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban polituk seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.

d. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*)

   Sumber internal yang mekihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

Selain keempat sumber kebijakan luar negeri di atas, terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat. Dengan banyaknya faktor yang beraneka ragam, Rosenau menyarankan untuk melakukan *cluster of input*, dimana penstudi kebijakan luar negeri dapat memeilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti.

I.7 Alur Pemikiran

I.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk menunjang penulisan ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu dengan metode pengumpulan data. Data-data yang sudah terkumpul melauli seleksi dan pengelompokkan berdasarkan kebutuhan yang nantinya akan dianalisis. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan yang dapat diartikan secara jelas. Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, aktual dan akurat mengenai realita, kejadian serta hubungannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hahikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penejaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2001,hlm.5).

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1) **Data Primer** adalah Sumber data yang digunakan yaitu berupa pernyataan resmi, *press realese* dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh China melalui website *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic China, Embassy of the People's Republic Of China in The Syrian Arab Republic* dan pernyataan resmi, *press realese* dan dokumen berupa resolusi-resolusi dari PBB dan Dewan Keamanan melalui website *UN News Centre, United Nation, Security Council 2011, United Nations Mission to Investigate Allegationsof the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, United Nations Supervision Mission in Syria*.
2) **Data Sekunder** adalah Sumber data yang digunakan yaitu diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan konflik Suriah, peran PBB dan DK dalam

konflik Suriah, serta peran China dalam konflik Suriah dan buku-buku teori organisasi internasional dan politik luar negeri.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan riset berupa dokumen resmi yang dikelauarkan negara melalui kementerian terkait dan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data yang dikumpulkan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan beberapa sumber data baik data pimer maupun sekunder. Untuk teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara melakukan kegiatan riset seperti pengumpulan dokumen resmi yang dikelauarkan negara yang didapat dari kementerian terkait dan dokumen resmi organisasi internasional. Kegiatan riset tersebut diakukan mengumpulkan informsasi dan data yang berasal *press realese* yang dikeluarkan oleh pemerintah China melalui situs web resmi negara dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PBB dan Dewan Keamanan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Untuk data sekunder, penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku mengenai teori organisasi internasional, dari buku mengenai pemerintahan China dan juga jurnal imliah yang terkait dengan peran China di konflik Suriah serta dari pencarian informasi pendukung lainnya melalui artikel online dan website.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalah di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.9 Sistematika Pembabakan

Dalam menyajikan pemahaman yang sistematis mengenai political power China dalam membatalkan draft resolusi DK PBB secara menyeluruh, karya ilmiah ini terbagi dalam empat bab yang terdiri dari bab serta sub bab yang bersinergi satu dengan yang lain. Bab - bab yang akan dipaparkan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan. Kemudian disambung dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembabakan.

BAB II PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PANDANGAN CHINA DALAM KONFLIK SURIAH

Pada bagian ini dijelaskan secara lengkap terjadinya konflik suriah yang menyebabkan organisasi internasional khususnya PBB dan Dewan Keamanan membuat beberapa resolusi untuk memecah konflik Suriah. Selanjutnya akan ada peran organisassi nternasional dalam konflik Suriah, adanya peran Persatuan Bangsa Bangsa dalam konflik Suriah dan terlebih peran Dewan Keamaan PBB. Dewan Keamanan dalam memecah konflik Suriah dan respon negara anggota tetap DK PBB terhadap konflik Suriah, resolusi Dewan Keamanan terhadap konflik Suriah, lahirnya draft resolusi Dewan Keamanan dan pandangan China terhadap draft resolusi tersebut. Pada bagian ini juga terdapat penjelasan mengenai pandangan China terhadap konflik Suriah sebagai pengantar ke pembahasan selanjutnya.

BAB III PERAN CHINA DALAM MEMBATALKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB

Pada bagian ini akan menganalisis mengenai peran China dalam membatalkan draft resolusi DK PBB. Dalam bab ini akan dijelaskan secara lengkap bagaimana upaya China dalam membatalkan draft resolusi yang dibuat oleh DK PBB untuk memecah konflik Suriah.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian ini mengenai peran China dalam membatalkan resolusi DK PBB terhadap konflik Suriah